



Article Informations
Corresponding Email:
deviantrg@gmail.com

Received: 25/07/2025; Accepted:
20/09/2025; Published: 15/10/2025

DIPLOMASI VAKSIN INDONESIA TERHADAP WHO DALAM MENANGGULANGI COVID-19 PERIODE 2020-2021

Devian Tria Gunawan

Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jenderal Achmad Yani

Abstrak

Penelitian ini mengkaji diplomasi vaksin pemerintah Indonesia dalam menjalin kerja sama dengan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan negara mitra untuk menanggulangi pandemi COVID-19 pada 2020–2021. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini menggali strategi diplomasi vaksin melalui jalur bilateral dan multilateral, termasuk partisipasi dalam COVAX Facility dan kolaborasi dengan negara produsen. Mengacu pada teori diplomasi Joseph Nye, diplomasi vaksin Indonesia mencerminkan penggunaan soft power untuk membangun hubungan saling menguntungkan dalam kerjasama kesehatan global. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi vaksin Indonesia berhasil meningkatkan akses vaksin dan memperkuat posisi di kancah internasional, meskipun masih menghadapi tantangan seperti keterbatasan pasokan dari WHO dan isu pemerataan vaksinasi. Diplomasi ini bertujuan untuk memperoleh vaksin secara adil serta membangun kemandirian dan ketahanan sektor kesehatan nasional.

Kata Kunci: Diplomasi, Vaksin, WHO

Abstract

This research examines the Indonesian government's vaccine diplomacy in establishing cooperation with the World Health Organization (WHO) and partner countries to tackle the COVID-19 pandemic in 2020–2021. With a qualitative approach, this research explores vaccine diplomacy strategies through bilateral and multilateral channels, including participation in the COVAX Facility and collaboration with producing countries. Referring to Joseph Nye's theory of diplomacy, Indonesia's vaccine diplomacy reflects the use of soft power to build mutually beneficial relationships in global health cooperation. Research results show that Indonesia's vaccine diplomacy has successfully increased vaccine access and strengthened its position on the international stage, although it still faces challenges such as supply limitations from the WHO and issues of vaccine equity. This diplomacy aims to obtain vaccines fairly and to build independence and resilience in the national health sector

Keywords: Diplomacy, Vaccine, WHO

1. PENDAHULUAN

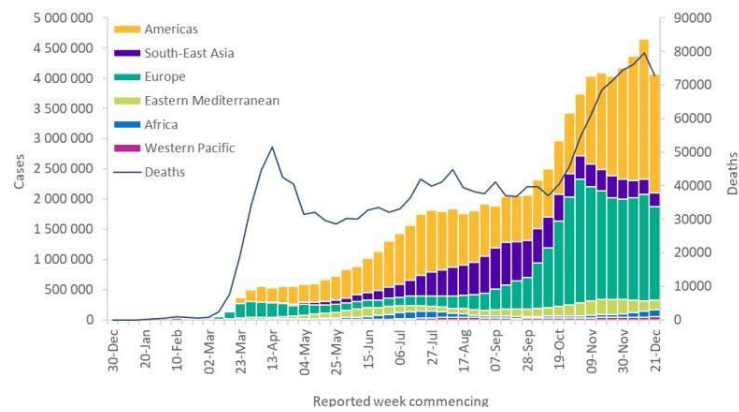
COVID-19, atau *Coronavirus disease 2019*, adalah penyakit baru yang disebabkan oleh SARS-CoV-2. Penderitanya dapat menunjukkan gejala ringan atau berat. Gejala ringan COVID-19 termasuk demam, batuk ringan, kelelahan, kehilangan indra penciuman dan pengecap, diare, nyeri otot, dan sakit kepala. Di sisi lain, gejala berat COVID-19 termasuk sesak nafas, kehilangan kemampuan berbicara dan bergerak, nyeri dada, komplikasi neurologis, dan akhirnya kematian. Meskipun COVID-19 menyerang orang dari berbagai usia, orang tua dan individu dengan riwayat penyakit lain paling rentan terpapar virus.¹

Kasus Corona secara global tercatat mencapai 9.826 kasus hingga 31 Januari 2020, dengan 9.720 kasus di China dan 106 kasus di luar China. Laporan yang dikeluarkan oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) menunjukkan bahwa sebagian besar individu yang terpapar virus Corona di bulan Januari melakukan perjalanan sebelumnya ke Wuhan dan menyebarkan virus tersebut kepada individu yang menunjukkan gejala. Pada 30 Januari 2020, Direktur Jenderal WHO mengumumkan penyebaran virus Corona sebagai *Public Health Emergency of International Concern* (PHEIC) karena tingginya risiko penularannya di wilayah China, regional, dan global. Pengumuman ini dibuat berdasarkan hasil peninjauan IHR *Emergency Committee* (EC) terhadap penyebaran virus Corona sejak 22 Januari 2020.²

Gambar 1. 1 Perkembangan Kasus COVID-19 Global Periode Desember 2019 – Desember 2020

¹ "Coronavirus disease 2019 Q&As", World Health Organization, diakses pada 5 Maret, 2021, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>.

² WHO, (2019-nCoV): *Situation Report 31 January*, 1.



Sumber: WHO, COVID-19 *Weekly Epidemiological Update*, 2020

Antara Desember 2019 dan Desember 2020, angka kasus dan kematian COVID-19 terus meningkat setiap bulan, seperti yang ditunjukkan pada gambar I.1. Pada 11 Maret 2020, WHO akhirnya menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global karena banyaknya kasus aktif. Tiga wilayah dengan jumlah kasus COVID-19 tertinggi adalah Amerika, Eropa, dan Asia Tenggara. Transmisi antar manusia adalah penyebab utama penyebaran COVID-19 yang cepat dan peningkatan yang signifikan. Bulan Desember mencatat rekor kasus COVID-19. Selama kurang lebih satu tahun, sebanyak 79 juta orang di seluruh dunia terinfeksi COVID-19, dan 1,7 juta di antaranya meninggal.³

Sebagai entitas yang bertanggung jawab terhadap kesehatan warganya, negara telah menerapkan berbagai kebijakan untuk menghadapi pandemi yang sedang terjadi. Kebijakan tersebut meliputi penerapan social distancing, lockdown di area yang terdampak, pelaksanaan pemeriksaan PCR secara massal, serta kebijakan terbaru dari pemerintah, yaitu PPKM

³ WHO, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report 11 February 2020* (Geneva: World Health Organization, 2020), 1.

(Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat). Dalam perkembangannya, pemerintah menyadari jika kebijakan yang telah di jalankan dalam upaya menghentikan persebaran Covid-19 tidaklah cukup, oleh karena itu pemerintah mengeluarkan kebijakan vaksinasi. Kebijakan vaksinasi ini dilaksanakan melalui kolaborasi dengan negara lain dan lembaga internasional untuk memenuhi kebutuhan vaksin, baik melalui pengembangan bersama maupun melalui pembelian. Untuk memastikan keberhasilan kebijakan vaksinasi ini, pemerintah Indonesia melakukan berbagai upaya diplomasi vaksin dengan penekanan pada akses terhadap ketersediaan vaksin.

Pada bulan Januari 2021, Retno Marsudi, Menteri Luar Negeri Indonesia, mengungkapkan fokus utama diplomasi untuk tahun tersebut, yang mencakup upaya “Membangun kemandirian dan ketahanan kesehatan nasional atau Jaminan Kesehatan Nasional.” Pentingnya tindakan Indonesia dalam mengatasi pandemi semakin mendesak, mengingat situasi COVID-19 yang belum tertangani dengan baik dan persentase penduduk yang telah divaksinasi masih sangat rendah, yaitu hanya 5,2% dari total populasi yang telah menerima vaksin secara lengkap.⁴ Hasil dari upaya diplomasi vaksin tidak memenuhi ekspektasi, karena WHO hanya menjamin Indonesia memperoleh 20% dari total dosis vaksin yang diperlukan untuk populasi. Di sisi lain, Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menjelaskan bahwa untuk mencapai standar keamanan kesehatan nasional, setidaknya 70% dari populasi, yang setara dengan 208.265.720 orang, harus divaksinasi. Dengan

⁴ Josh Holder, “Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World,” The New York Times (The New York Times, January 29, 2021), <https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html>.

demikian, Indonesia memerlukan lebih dari 400 juta dosis vaksin untuk melaksanakan program vaksinasi dua kali.⁵

Kondisi ini merupakan isu yang perlu segera ditangani, karena ketahanan masyarakat Indonesia terhadap pandemi COVID-19 sangat penting agar mereka dapat kembali melaksanakan aktivitas sehari-hari seperti sebelumnya. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi dengan negara-negara lain untuk mencapai kepentingan nasional, yaitu menciptakan kemandirian dan ketahanan dalam sektor kesehatan, termasuk Jaminan Kesehatan Nasional. Dengan demikian, Pemerintah Indonesia melaksanakan diplomasi vaksin melalui kerjasama dengan negara lain, baik secara bilateral maupun multilateral, terkait penanganan COVID-19. Selain itu, untuk memenuhi kebutuhan vaksin yang tidak dapat dipenuhi melalui kerjasama bilateral, pemerintah juga menjalin hubungan dengan berbagai lembaga internasional, seperti *Vaccines Global Access (COVAX)*, *Global Alliance for Vaccines and Immunization (GAVI)*, dan *Coalition for Epidemic Preparedness Innovations (CEPI)*, yang diinisiasi oleh WHO dan UNICEF. Melalui upaya diplomasi vaksin ini, pemerintah Indonesia memastikan bahwa seluruh warganya memiliki hak untuk mendapatkan vaksinasi tanpa terkecuali. Kementerian Luar Negeri Indonesia, bersama dengan kabinet nasional, aktif dalam diplomasi vaksin dengan COVAX, GAVI, dan CEPI yang didukung oleh WHO dan UNICEF.⁶

2. PEMBAHASAN

⁵ "More than 85 Poor Countries Will Not Have Widespread Access to Coronavirus Vaccines before 2023," Economist Intelligence Unit, 19 Februari 2021, <https://www.eiu.com/n/85-poor-countries-will-not-have-access-to-coronavirus-vaccines/>.

⁶ Harizqi, D., 2022. Analisis Strategi Diplomasi Vaksin Multijalur Indonesia dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid-19 2020-202aa1. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 2(2), pp.105-120.

1. Kebijakan yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia terkait Pandemi

Di Indonesia, pemerintah telah menerapkan berbagai strategi untuk mengatasi peningkatan kasus positif COVID-19. Langkah-langkah ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat serta menekan laju penyebaran virus. Berbagai strategi yang diimplementasikan mencakup sejumlah tindakan penting yang dilakukan secara berkelanjutan. Dengan pendekatan yang terencana, diharapkan situasi pandemi yang terus berkembang dapat dikelola dengan baik. Penanganan yang efisien sangat krusial untuk menjaga keselamatan dan kesehatan masyarakat di tengah situasi krisis ini. Berbagai kebijakan yang diterapkan diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam menurunkan angka infeksi. Upaya ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam menjaga kesehatan publik. Selain itu, kolaborasi antara berbagai pihak juga menjadi kunci dalam mengatasi tantangan ini. Dengan demikian, diharapkan masyarakat dapat beradaptasi dan tetap aman selama masa pandemi.⁷ Adapun penjelasan lebih lanjut mengenai kebijakan tersebut:

Pertama, anjuran yang disarankan oleh Menteri Kesehatan RI bahwa jarak aman untuk memenuhi kaidah physical distancing adalah minimal satu meter, hal ini dilakukan agar tidak terjadi penyebaran COVID-19 melalui udara. Dalam upaya mewujudkan strategi preventif Presiden Jokowi mendirikan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 yang difungsikan sebagai juru teknis penanganan pandemi COVID-19. Adanya penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) melalui Permenkes 9

⁷ Agustino, L. (2020). Analisis kebijakan penanganan wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270.

tahun 2020 untuk mencegah penyebaran virus COVID-19 yang lebih luas. Hal ini juga sebagai menekan laju angka kematian masyarakat akibat terpapar virus COVID-19.⁸

Pemerintah terus berupaya menekan penyebaran COVID-19. Sejak Indonesia mengonfirmasi masuknya wabah ini pada 2 April 2020, berbagai kebijakan telah diterapkan. Pada tanggal tersebut, Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengajukan permohonan kepada Menteri Kesehatan untuk menerapkan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) di wilayah Jabodetabek, dengan 885 kasus positif COVID-19 tercatat di Jakarta.

Gambar 2. 1 Kebijakan Pembatasan Sosial

Kebijakan	Bekerja dan Sekolah	Perdagangan	Aktivitas Sosial	Mobilitas Masyarakat
<i>PSBB</i>	100% WFH dan belajar daring	-Pusat Perbelanjaan Jabodetabek tutup -Pasar tradisional dibatasi	-Pembatasan kegiatan keagamaan dan kegiatan di tempat umum	-Pembatasan transportasi umum dan pribadi
<i>PSBB Transisi</i>	50% WFH, 100% belajar daring	-Pusat perbelanjaan Jabodetabek buka 10.00-21.00, kapasitas 50% -Pasar tradisional dibatasi, sebagian ditutup	-Tempat ibadah, ruang publik buka, kapasitas 50%. -Larangan untuk makan ditempat	-Kendaraan pribadi, angkutan massal, dan taksi kapasitas 50%
<i>PSBB Ketat</i>	75% WFH, 100% belajar daring	-Pusat perbelanjaan Jabodetabek tutup -Pasar tradisional dibatasi -Tempat makan beroperasi, tapi makan ditempat dilarang	-Tempat ibadah hanya menerima Jemaah di sekitar lokasi. -Kawasan dengan kasus tinggi wajib dirumah. -Tempat umum dan ruang public tutup -Dilarang berkerumun lebih dari 5 orang	-Kendaraan pribadi, angkutan massal dan taksi kendaraan 50%
<i>PPKM Jawa-Bali</i>	75% WFH, 100% belajar daring	-Tempat makan kapasitas 25% -Pusat perbelanjaan beroperasi pukul 10.00-19.00	-Tempat ibadah kapasitas 50% -Pembatasan aktivitas masyarakat pukul 19.00-05.00	-Kapasitas moda transportasi 50%, jam operasional transportasi umum dibatasi
<i>PPKM Mikro</i>	50% WFH, 100% belajar daring	-Tempat makan kapasitas 50% -Pusat perbelanjaan beroperasi pukul 10.00-21.00	-Tempat ibadah kapasitas 50% -Fasilitas umum ditutup -Kegiatan sosial budaya dihentikan	-Kendaraan pribadi, angkutan umum dan taksi diberika kapasitas sebesar 50% -Penumpang transportasi jarak jauh wajib menunjukkan hasil swab negatif
<i>PPKM Darurat</i>	Sektor Kritis diperbolehkan 100% WFO dengan protokol kesehatan. 100% belajar daring Sektor non-esensial 100% WFH Sektor esensial 50% WFO.	-Pusat perbelanjaan tutup. -Supermarket, pasar tradisional, dan pasar kelontong, dan pasar swalayan jam operasional sampai pukul 20.00, dengan kapasitas 50%. -Apotek dan toko obat bias beroperasi 24 jam. -Tempat makan hanya menyediakan layanan antar atau delivery.	-Tempat ibadah ditutup. -Kegiatan seni budaya dan olahraga dihentikan. -Fasilitas area publik ditutup. -Resepsi pernikahan maksimal 30 orang, dilarang makan di tempat.	-Transportasi umum kapasitas 70%. -Penumpang transportasi jarak jauh wajib menunjukkan kartu vaksin dan hasil swab negatif.

Seterusnya hingga Agustus 2021 diterapkan PPKM level 4/3/2/1 sesuai dengan kasus tertinggi COVID-19 dan angka kematian disetiap wilayah

⁸ Ikmal, N. M., & Noor, M. (2021). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan covid-19. Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah, 19(2), 164.

Sumber: Pemberitaan Kompas dan Inmendagri Nomor 24, 25, 26
Tahun 2021.

2. Urutan Kebijakan Indonesia Dalam Memahami Pandemi Global

World Health Organization (WHO) telah menetapkan berbagai pedoman untuk mencegah penyebaran virus COVID-19. Aturan-aturan ini bertujuan untuk melindungi kesehatan masyarakat dan mengurangi risiko penularan. Dalam konteks ini, penting untuk memahami langkah-langkah yang direkomendasikan oleh WHO. Berikut adalah penjelasan mengenai aturan tersebut:⁹

1. Salah satu langkah utama yang disarankan oleh WHO adalah penerapan protokol kesehatan yang ketat. Mencuci tangan secara rutin dengan sabun dan air selama minimal 20 detik atau menggunakan hand sanitizer berbasis alkohol sangat dianjurkan. Hal ini bertujuan untuk menghilangkan virus yang mungkin menempel pada tangan. Selain itu, menghindari menyentuh wajah, terutama area mata, hidung, dan mulut, juga merupakan langkah penting untuk mencegah infeksi. Protokol ini harus diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari.
2. Penggunaan masker di tempat umum juga menjadi salah satu aturan penting. WHO merekomendasikan agar masyarakat memakai masker, terutama di area yang padat dan di dalam

⁹ Sumber: World Health Organization. (2020). "COVID-19: Guidelines for the Public." [WHO](<https://www.who.int>).

ruangan. Masker berfungsi sebagai penghalang untuk mengurangi risiko penularan virus dari satu individu ke individu lainnya. Dengan memakai masker, kita tidak hanya melindungi diri sendiri tetapi juga orang lain di sekitar kita. Oleh karena itu, kesadaran akan pentingnya penggunaan masker harus ditingkatkan.

3. Jaga jarak fisik adalah langkah selanjutnya yang ditekankan oleh WHO. Menjaga jarak minimal 1 meter dari orang lain dapat mengurangi kemungkinan penularan virus. Dalam situasi di mana jarak fisik sulit dipertahankan, penggunaan masker menjadi semakin penting. Selain itu, menghindari kontak fisik seperti berjabat tangan juga dianjurkan. Dengan menjaga jarak, kita dapat melindungi diri dan orang lain dari risiko infeksi.
4. Ventilasi yang baik di dalam ruangan juga merupakan faktor penting dalam mencegah penyebaran COVID-19. WHO merekomendasikan untuk memastikan adanya sirkulasi udara yang baik dengan membuka jendela atau menggunakan sistem ventilasi yang efektif. Ventilasi yang baik dapat membantu mengurangi konsentrasi virus di udara. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan kondisi ventilasi di tempat tinggal dan tempat kerja.
5. Menghindari kerumunan dan pertemuan besar adalah langkah pencegahan yang sangat dianjurkan. WHO menyarankan agar masyarakat menghindari kerumunan dan memilih untuk melakukan pertemuan secara virtual jika memungkinkan.

Dalam situasi di mana pertemuan fisik tidak dapat dihindari, menjaga jarak dan menggunakan masker harus diterapkan. Dengan mengurangi kerumunan, kita dapat meminimalkan risiko penularan virus.

6. Vaksinasi merupakan salah satu cara paling efektif untuk melindungi diri dari COVID-19. WHO mendorong masyarakat untuk mendapatkan vaksin sesuai dengan rekomendasi yang berlaku. Vaksinasi tidak hanya melindungi individu yang divaksinasi tetapi juga membantu mencapai kekebalan kelompok. Oleh karena itu, penting untuk mengikuti program vaksinasi yang disediakan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan.
7. Pendidikan dan kesadaran masyarakat tentang gejala COVID-19 juga sangat penting. WHO menekankan perlunya meningkatkan kesadaran tentang gejala yang mungkin muncul, seperti demam, batuk, dan kesulitan bernapas. Masyarakat juga harus didorong untuk segera mencari perawatan medis jika mengalami gejala tersebut. Dengan meningkatkan pengetahuan, kita dapat lebih cepat mengidentifikasi dan menangani kasus COVID-19.
8. Isolasi dan karantina adalah langkah penting dalam mengendalikan penyebaran virus. WHO merekomendasikan agar individu yang terkonfirmasi positif COVID-19 mengikuti pedoman isolasi. Selain itu, mereka yang telah terpapar virus juga harus menjalani karantina untuk mencegah penularan

lebih lanjut. Mematuhi pedoman ini sangat penting untuk melindungi kesehatan masyarakat.

9. Pelaporan dan pemantauan kasus COVID-19 juga menjadi bagian dari strategi pencegahan. WHO menekankan pentingnya pelaporan kasus dan pemantauan epidemiologi untuk mengidentifikasi dan mengendalikan penyebaran virus. Dengan data yang akurat, pihak berwenang dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi wabah. Oleh karena itu, masyarakat juga diharapkan berperan aktif dalam melaporkan kasus yang mencurigakan.
10. Kebersihan lingkungan adalah aspek lain yang tidak boleh diabaikan. WHO merekomendasikan untuk melakukan pembersihan dan disinfeksi secara rutin pada permukaan yang sering disentuh, seperti pegangan pintu, meja, dan perangkat elektronik. Dengan menjaga kebersihan lingkungan, kita dapat mengurangi risiko penularan virus. Oleh karena itu, penting untuk menerapkan praktik kebersihan yang baik di rumah dan tempat kerja.

Selain langkah-langkah di atas, WHO juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah, lembaga kesehatan, dan masyarakat. Kerjasama ini diperlukan untuk memastikan bahwa semua langkah pencegahan dapat diterapkan secara efektif. Masyarakat juga diharapkan untuk berpartisipasi dalam program-program kesehatan yang disediakan.

Dengan kolaborasi yang baik, kita dapat bersama-sama mengatasi pandemi ini.

3. Pelaksanaan Diplomasi di Indonesia

WHO bersama GAVI mulai mengarahkan Indonesia dan 91 negara lain yang telah menerima vaksin pada 21 September 2020 tentang mekanisme dan jadwal pendistribusian vaksin ke masing-masing negara. WHO dan GAVI menyatakan bahwa negara hanya akan menerima vaksin baru jika sudah ada rencana vaksin. Selanjutnya, rencana vaksin harus diverifikasi menggunakan alat penilaian kesiapan negara yang dikembangkan oleh WHO. Beberapa kriteria yang dinilai termasuk prosedur pengiriman, ketersediaan rantai dingin, pelatihan, rencana penyebaran, dan prosedur untuk menentukan kelompok prioritas. Pedoman dan evaluasi rencana vaksin ini diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kantor Negara WHO.¹⁰

WHO dan UNICEF mendukung Kemenkes RI untuk melakukan survei online tentang penerimaan vaksin COVID-19 oleh publik. Survei ini dilakukan dari 19 hingga 30 September 2020 dan diikuti oleh 115.000 orang dari 34 Provinsi Indonesia. Ini dilakukan sesuai permintaan dari Indonesia Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI). Sebagian besar responden yang bersedia untuk divaksinasi COVID-19 berasal dari Papua, Jawa, dan Kalimantan. Menurut hasil survei, 65% penduduk Indonesia bersedia untuk divaksinasi, 7% menolak, dan 27% masih ragu untuk menerimanya.¹¹ Pada 20 November 2020, Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCEN) menyampaikan hasil survei melalui

¹⁰ Abbott dan Snidal, "Why States Act through," 13.

¹¹ Kemenkes RI, Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), 5.

talk show. Acara tersebut juga dihadiri oleh WHO dan UNICEF. Pemerintah melakukan upaya untuk menyebarkan vaksin COVID-19 kepada masyarakat melalui talk show ini.¹²

WHO memberikan dukungan teknis untuk simulasi vaksinasi di Kota Bogor dan Bekasi selama dua hari, 18 November hingga 19 November 2020. Tujuan dari simulasi ini adalah untuk memastikan bahwa masyarakat menerima vaksinasi yang baik dan bahwa protokol kesehatan terus diterapkan untuk mencegah penyebaran virus Corona yang lebih luas. Selain memfasilitasi pelatihan, WHO juga membantu menyusun rencana penyebaran vaksin nasional (National Vaccine Deployment Plan); membantu dalam pembuatan pedoman, modul pelatihan, dan materi KIE mengenai vaksinasi COVID-19; mendukung penulisan pedoman tambahan untuk mengantisipasi kejadian ikutan (adverse event) selama vaksinasi COVID-19¹³ dan mendorong pemerintah untuk memastikan kegiatan sosialisasi vaksin sudah berjalan lancar di setiap tingkatan. WHO telah meminta Kemenkes RI untuk mempersiapkan sistem pelaporan kejadian ikutan selama vaksinasi COVID-19 untuk memastikan keamanan vaksin.¹⁴

4. Strategi Diplomasi Vaksin Indonesia dalam Kerjasama dengan WHO

Gambar 4. 1 Strategi Diplomasi Vaksin Indonesia Bersama WHO

¹² WHO, Situation Report: 25 November 2020, 19.

¹³ WHO, Ikhtisar Kegiatan-7 12 November 2020, 6.

¹⁴ WHO, Ikhtisar Kegiatan-8 18 Desember 2020,



Sumber: WHO 2021

Diplomasi vaksin Indonesia dalam kerjasama dengan WHO mencakup berbagai strategi untuk memastikan akses terhadap vaksin dan memperkuat sistem kesehatan. Strategi ini melibatkan kolaborasi multilateral, penguatan kapasitas produksi vaksin dalam negeri, serta partisipasi aktif dalam forum internasional.

1. Indonesia menggunakan jalur multilateral untuk mendapatkan vaksin COVID-19. Melalui kerjasama dengan WHO, negara tersebut berupaya mendapatkan dukungan dalam distribusi vaksin dan mendapatkan akses terhadap teknologi vaksin. Hal ini penting untuk memastikan bahwa Indonesia tidak tertinggal dalam upaya vaksinasi global. Partisipasi dalam program COVAX

juga merupakan salah satu langkah strategis untuk memastikan distribusi vaksin yang adil.¹⁵

2. Fokus utama adalah meningkatkan kemampuan produksi vaksin dalam negeri Indonesia, yang ingin dicapai melalui kerjasama dengan perusahaan farmasi internasional. Dengan cara ini, Indonesia tidak hanya dapat bergantung pada impor vaksin, tetapi juga dapat memenuhi kebutuhan vaksin sendiri. Ini sejalan dengan upaya untuk mencapai kemandirian kesehatan.¹⁶
3. Diplomasi vaksin juga melibatkan transfer teknologi dan informasi. Indonesia aktif berpartisipasi dalam diskusi internasional untuk bertukar pengalaman dan pengetahuan tentang proses pembuatan dan penyebaran vaksin. Diharapkan kerja sama ini akan mempercepat proses vaksinasi di Indonesia dan meningkatkan efektivitas program vaksinasi. Selain itu, kerja sama ini membuka peluang baru untuk penelitian dan pembuatan vaksin.¹⁷
4. Indonesia juga mendukung akses vaksin yang adil di seluruh dunia. Melalui kerjasama dengan WHO, Indonesia mengatakan bahwa distribusi vaksin yang merata sangat penting, terutama untuk negara-negara berkembang. Ini penting untuk mengatasi

¹⁵ Sari, D. S., Halimah, M. H. M., Akim, A., & Habibullah, A. Z. (2022). Indonesian Foreign Policy on Covid-19 Vaccine Procurement. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), hal 279

¹⁶ Wicaksono, R. M. T. A. D., Hirawan, F. B., & Ragamustari, S. K. (2022). An Analysis of Indonesia's Free and Active COVID-19 Vaccine Diplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), hal 35

¹⁷ Prajogo, P., Almubaroq, H. Z., Widyatmoko, W. G., & Pangestu, L. G. (2022). Indonesia's Leadership through "Vaccine Diplomacy" in Securing National and Global Vaccine Stocks. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 6(02), hal. 119.

ketidaksamaan dalam akses vaksin dan memastikan bahwa semua negara memiliki kesempatan yang sama untuk melindungi penduduknya dari COVID-19.¹⁸

5. Diplomasi vaksin Indonesia juga mencakup kerjasama dengan negara lain. Indonesia menjalin hubungan bilateral dengan negara-negara seperti Tiongkok dan India yang dapat membuat vaksin. Kerjasama ini tidak hanya mencakup pengadaan vaksin, tetapi juga transfer teknologi dan pengetahuan yang diperlukan untuk membuat vaksin.¹⁹
6. Pemerintah Indonesia juga berusaha meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksinasi melalui kampanye informasi dan edukasi. Ini penting untuk mencapai target vaksinasi dan melindungi masyarakat dari virus.²⁰
7. Indonesia juga berkomitmen untuk membantu dalam penelitian dan pengembangan vaksin. Melalui kerjasama dengan lembaga penelitian internasional, mereka berusaha mengembangkan vaksin yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Diharapkan vaksin ini akan lebih efektif dan mempercepat pemulihan pandemi.²¹
8. Diplomasi vaksin Indonesia juga mencakup penguatan sistem kesehatan secara keseluruhan. Dengan meningkatkan kapasitas sistem kesehatan, Indonesia dapat lebih siap menghadapi

¹⁸ Privor-Dumm, L., Excler, J. L., Gilbert, S., Karim, S. S. A., Hotez, P. J., Thompson, D., & Kim, J. H. (2023). Vaccine access, equity and justice: COVID-19 vaccines and vaccination. *BMJ global health*, 8(6),

¹⁹ Sari, D. S., Halimah, M. H. M., Akim, A., & Habibullah, A. Z. (2022). Indonesian Foreign Policy on Covid-19 Vaccine Procurement. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), hal. 282

²⁰ Baharuddin, T., Sairin, S., Qodir, Z., Jubba, H., & Nurmandi, A. (2022). Partisipasi dan kepercayaan sosial daring: kebijakan vaksinasi COVID-19 di Indonesia. *Jurnal Studi Komunikasi*, 6(1), hal. 285

²¹ Zaky, A., & Kusumastuti, R. Sentiment Analysis of Covid-19 Vaccination Policy in Indonesia. *Spirit Publik: Jurnal Administrasi Publik*, 17(1), hal. 82

pandemi di masa depan. Ini termasuk meningkatkan infrastruktur kesehatan, pelatihan tenaga kesehatan, dan penguatan sistem surveilans penyakit.²²

9. Indonesia juga berpartisipasi aktif dalam pembuatan kebijakan kesehatan global. Melalui partisipasinya dalam forum-forum internasional, negara ini memiliki kesempatan untuk menyuarakan kepentingan negara-negara berkembang dan membantu mengembangkan kebijakan yang mendukung akses yang adil ke vaksin. Ini penting untuk memastikan bahwa suara negara-negara kecil didengar dalam proses pengambilan keputusan global.²³

10. Diplomasi vaksin Indonesia juga mencakup kerjasama dengan sektor swasta dan organisasi non-pemerintah. Kerjasama ini akan memungkinkan Indonesia untuk memperluas jangkauan program vaksinasi dan meningkatkan efektivitas distribusi vaksin. Ini sangat penting untuk memastikan bahwa vaksin dapat diakses oleh semua lapisan masyarakat.²⁴

Secara keseluruhan, Indonesia berusaha untuk menjadi bagian dari solusi untuk menghadapi pandemi dan memperkuat sistem kesehatan global

²² Sari, D. S., Halimah, M. H. M., Akim, A., & Habibullah, A. Z. (2022). Indonesian Foreign Policy on Covid-19 Vaccine Procurement. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), hal. 294.

²³ Wicaksono, R. M. T. A. D., Hirawan, F. B., & Ragamustari, S. K. (2022). An Analysis of Indonesia's Free and Active COVID-19 Vaccine Diplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), hal 40

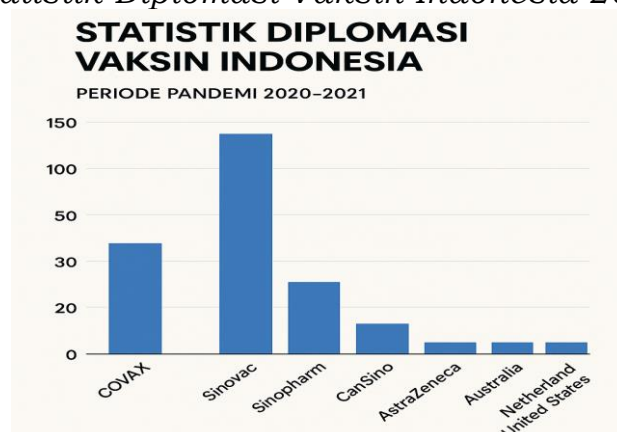
²⁴ Prajogo, P., Almubaroq, H. Z., Widyatmoko, W. G., & Pangestu, L. G. (2022). Indonesia's Leadership through "Vaccine Diplomacy" in Securing National and Global Vaccine Stocks. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 6(02), hal. 118

dengan menggunakan kolaborasi, inovasi, dan akses yang adil dalam strategi diplomasi vaksinnnya dalam kerjasama dengan WHO.

5. Implementasi Diplomasi Vaksin Indonesia Selama Pandemi

Implementasi diplomasi vaksin Indonesia selama pandemi mencakup beberapa aspek penting. Pertama, Indonesia berhasil menjalin kerjasama dengan berbagai negara untuk pengadaan vaksin, yang menunjukkan kemampuan diplomasi kesehatan yang kuat. Kedua, distribusi vaksin yang efektif di seluruh wilayah Indonesia menjadi indikator keberhasilan, meskipun tantangan geografis tetap ada. Ketiga, partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi juga meningkat, mencerminkan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Keempat, Indonesia berperan aktif dalam forum internasional untuk mendukung akses vaksin global, menunjukkan komitmen terhadap solidaritas internasional. Kelima, evaluasi dampak vaksinasi terhadap penurunan kasus COVID-19 menjadi bukti konkret keberhasilan diplomasi ini. Terakhir, tantangan yang dihadapi, seperti varian baru dan ketidakmerataan distribusi, perlu diatasi untuk memastikan keberlanjutan program vaksinasi.

Gambar 4. 2 Statistik Diplomasi Vaksin Indonesia 2020 – 2021



Sumber: Antara News 2021

Table 4. 1 Kerjasama Internasional Indonesia Selama Pandemi COVID-19 2020 – 2021

Negara/Institusi	Jenis Kerjasama	Jumlah/Bentuk Bantuan
WHO/COVAX Facility	Donasi vaksin & akses merata (GAV/CEPI)	~11,7 juta dosis vaksin lokal
China (Sinovac)	Pengadaan & produksi vaksin lokal	>115 juta dosis bulk vaksin Sinovac
Uni Emirat Arab (Sinopharm)	Donasi vaksin dan pengembangan vaksin berbasis G42	500.000 dosis Sinopharm + pengembangan G42
Amerika Serikat (Pfizer/Moderna)	Donasi vaksin, alat kesehatan	8 juta dosis Moderna + Pfizer
Jepang & Australia (AstraZeneca)	Alat tes, laboratorium & masker	Beberapa juta dosis AstraZeneca + alat medis & APD
Uni Eropa (Team Europe)	Pendanaan respons & vaksinasi melalui COVAX	PCR test kits, masker & pelatihan

Sumber: UNAIR.ac.id 2021

3. KESIMPULAN

Kesimpulan dari diplomasi vaksin Indonesia terhadap WHO dalam menanggulangi COVID-19 selama periode 2020-2021 menunjukkan bahwa pendekatan yang diambil sangat dipengaruhi oleh teori diplomasi yang dikemukakan oleh Joseph Nye, khususnya dalam konteks penggunaan Soft Power. Indonesia berhasil membangun hubungan yang kuat dengan negara-negara lain dan organisasi internasional, tidak hanya untuk mendapatkan akses terhadap vaksin, tetapi juga untuk memperkuat posisinya di kancah global. Melalui kerjasama internasional dan partisipasi aktif dalam forum-forum global, Indonesia menunjukkan komitmennya terhadap kesehatan global dan solidaritas internasional, yang merupakan inti dari Soft Power.

Strategi diplomasi vaksin Indonesia mencakup berbagai aspek, mulai dari pengadaan vaksin hingga distribusi yang efektif di seluruh wilayah. Dengan memanfaatkan jalur multilateral dan menjalin kerjasama dengan perusahaan farmasi internasional, Indonesia berupaya untuk meningkatkan kapasitas produksi vaksin dalam negeri dan memastikan akses yang adil bagi

semua lapisan masyarakat. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam program vaksinasi juga meningkat, mencerminkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan upaya edukasi yang dilakukan untuk mengatasi keraguan terhadap vaksin.

Namun, tantangan tetap ada, seperti munculnya varian baru dan ketidakmerataan distribusi vaksin di berbagai daerah. Evaluasi keberhasilan diplomasi vaksin Indonesia perlu dilakukan secara berkala untuk mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan, serta merumuskan strategi yang lebih baik di masa depan. Dengan pendekatan yang inklusif dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, Indonesia dapat memperkuat posisinya dalam diplomasi kesehatan global. Keberhasilan ini tidak hanya penting untuk penanganan pandemi saat ini, tetapi juga untuk masa depan kesehatan masyarakat Indonesia dan kemandirian kesehatan nasional.

DAFTAR PUSTAKA

“Coronavirus diseases 2019 Q&As”, World Health Organization, diakses pada 5 Maret, 2021, <https://www.who.int/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/question-and-answers-hub/q-a-detail/coronavirus-disease-covid-19>.

“More than 85 Poor Countries Will Not Have Widespread Access to Coronavirus Vaccines before 2023,” Economist Intelligence Unit, 19 Februari 2021, <https://www.eiu.com/n/85-poor-countries-will-not-have-access-to-coronavirus-vaccines/>.

Abbott dan Snidal, “Why States Act through,” 13.

Agustino, L. (2020). Analisis kebijakan penanganan wabah COVID-19: Pengalaman Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 16(2), 253-270.

- Harizqi, D., 2022. Analisis Strategi Diplomasi Vaksin Multijalur Indonesia dalam Upaya Mengatasi Pandemi Covid-19 2020-202aa1. *Jurnal Ilmu Hubungan Internasional LINO*, 2(2), pp.105-120.
- Ikmal, N. M., & Noor, M. (2021). Kebijakan pemerintah Indonesia dalam penanganan covid-19. *Jurnal Litbang Provinsi Jawa Tengah*, 19(2), 164.
- Josh Holder, "Tracking Coronavirus Vaccinations Around the World," *The New York Times* (The New York Times, January 29, 2021), <https://www.nytimes.com/interactive/2021/world/covid-vaccinations-tracker.html>.
- Kemenkes RI, Survei Penerimaan Vaksin COVID-19 di Indonesia (Jakarta: Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, 2020), 5.
- Prajogo, P., Almubaroq, H. Z., Widyatmoko, W. G., & Pangestu, L. G. (2022). Indonesia's Leadership through "Vaccine Diplomacy" in Securing National and Global Vaccine Stocks. *JESS (Journal of Education on Social Science)*, 6(02), hal. 119.
- Sari, D. S., Halimah, M. H. M., Akim, A., & Habibullah, A. Z. (2022). Indonesian Foreign Policy on Covid-19 Vaccine Procurement. *Intermestic: Journal of International Studies*, 7(1), hal 279
- Sumber: World Health Organization. (2020). "COVID-19: Guidelines for the Public." [WHO](<https://www.who.int>).
- WHO, (2019-nCoV): *Situation Report 31 January*, 1.
- WHO, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report 11 February 2020* (Geneva: World Health Organization, 2020), 1.
- WHO, *Coronavirus Disease 2019 (COVID-19): Situation Report 11 February 2020* (Geneva: World Health Organization, 2020), 1.
- WHO, Ikhtisar Kegiatan-7 12 November 2020, 6.
- WHO, Ikhtisar Kegiatan-8 18 Desember 2020,
- WHO, Situation Report: 25 November 2020, 19.
- Wicaksono, R. M. T. A. D., Hirawan, F. B., & Ragamustari, S. K. (2022). An Analysis of Indonesia's Free and Active COVID-19 Vaccine Diplomacy. *Jurnal Hubungan Internasional*, 11(1), hal 35